

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh. 2011. *Ilmu Negara*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Adnan Djamal. 2009. *Konfigurasi Politik dan Hukum Institutionalisation Judicial Review di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Affan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ahmad Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenanda Media Group. Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana. Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta.
- Hans Kelsen. 1973. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Somardi. 2007. Bee Media Indonesia. Jakarta.
- Hotma. P. Sibuae. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN, PT. Sinar Grafika*. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Konstitusi Press. Jakarta.
- , 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.

- , 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Penerbit Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta.
- , 2004. *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Otje Salman & Anthon F. Susanto. 2007. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Menemukan Kembali*. Refika Aditama. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Raisul Muttaqien. 2010. *Teori Hukum Murni (Hans Kelsen)*. Nusamedia. Bandung.
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Negara Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana. Jakarta.
- Yuswalina & Kun Budianto. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press. Malang.

Zulkraenaen & Beni Ahmad Saebani. 2012. *Hukum Konstitusi*. Pustaka Setia. Bandung.

Jurnal

Bambang Sutiyoso. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 17, Nomor 2 April 2010. Hlm. 217-232.

Eko Sabar Prihatin. "Politik Hukum Otonomi Daerah tentang Pemilukada." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 43, Nomor 1 Januari 2014. Hlm. 51.

Hamdan Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Vol. 10, Nomor 3 September 2013. Hlm. 394.

Joko Widodo, "Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Vol. 11, Nomor 2 Agustus 2014. Hlm. 84.

Muhamad Sofian, "Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017", *Media of Law and Sharia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 1, Nomor 3 Maret 2020. Hlm. 144.

Nur Rosihin Ana. "Sengketa Hasil Pilkada dari Masa ke Masa." *Majalah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 168 Februari 2021. Hlm. 10-14.

Pan Mohamad Faiz. Prosiding Konferensi Nasional HTN Ke-5: "Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas & Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTAN-HAN) Republik Indonesia, Batusangkar, 9-11 November 2018. Hlm. 1661.

-----, "Efektivitas Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada." *Majalah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 138 Agustus 2018. Hlm. 78.

Tanto Lailam & Putri Anggia. "Pengenyaningan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah

Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Vol. 17, Nomor 2 Juni 2020. hlm. 212-213.

Internet

<https://rumahpemilu.org/92638932-2/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 16.12 WITA.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/20195101/kode-inisiatif-dibanding-2018-permohonan-sengketa-hasil-pilkada-2020/> diakses pada 11 Agustus 2021 pukul 21.05 WITA.

Lampiran Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) dalam <https://kumparan.com/kumparannews/9-gugatan-pilkada-di-mk-lanjut-ke-pembuktian-meski-lewati-syarat-selisih-suara-1vCuIVRfriz/full> diakses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 17.06 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan MK No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUPXV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.KOT-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021